

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi

TIA SOFA LESTARI

NPM : C10160082



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

TIA SOFA LESTARI

NPM : C10160082

Bandung, 10 Maret 2020

Pembimbing



Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung jawab yuridis ada pada penulis

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 10 Maret 2020

Tia Sofa Lestari

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

**Ditulis oleh:
Tia Sofa Lestari**

**Pembimbing:
Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dan belanja daerah provinsi DKI Jakarta dan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selain itu, baik secara parsial maupun simultan, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Daerah

**THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE AND REMAINING
BUDGET CALCULATION TO REGIONAL EXPENDITURE OF DKI
JAKARTA PROVINCE**

**Written by:
Tia Sofa Lestari**

**Preceptor:
Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak**

ABSTRACT

The study aims to determine the description of regional original income, remaining budget calculation, and regional expenditure of the DKI Jakarta province and to determine the effect of regional original income and remaining budget calculation to regional expenditure of DKI Jakarta province. This research was conducted at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of the DKI Jakarta Provincial Government..

The research method used is a quantitative method with a descriptive and verification approach. The sampling technique used is saturated sampling. The data used comes from secondary data, namely budget realization reports of the DKI Jakarta provincial government budget for 2009-2018.

The results showed that regional original revenue and regional expenditure experienced growth that increased every year while remaining budget calculation experienced fluctuating growth. In addition, both partially and simultaneously, regional original revenue and remaining budget calculation have an effect on the regional expenditure of DKI Jakarta province.

Keywords: Regional Original Revenue, Remaining Budget Calculation, Regional Expenditures

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat ujian sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasanya karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan koreksi bagi penulis.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penelitian ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Sobandi dan Wensih (Alm.) serta kakak tersayang Imas Sri Hayati, Winda Susanti, Syahrul Sunandar, dan Dini Sofilutfiani yang telah memberikan dukungan materil dan moril sumber penyemangat tanpa adanya kata lelah yang tidak ternilai demi kelancaran dan keberhasilan penulis.

2. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
3. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
6. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
7. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung sekaligus selaku Dosen Wali Akuntansi 3 yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama menempuh perkuliahan di STIE Ekuitas Bandung.
8. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah membantu, membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti pada setiap permasalahan atas kesulitan penyusunan penelitian ini.
9. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Akuntansi, staf dan karyawan STIE Ekuitas.
10. Sahabat terbaik Icha Oktaviani, Lia Julianti, Rina Maulani, Sellymitha Aprianti, dan Susi Susilawati atas kebersamaan yang dilalui selama menempuh pendidikan di STIE Ekuitas dan juga selalu memberikan

motivasi, semangat yang tiada henti, dan masukan kepada peneliti selama penyusunan penelitian.

11. Tanti Imala Lutfi yang selalu memberikan semangat dan keceriaan kepada peneliti selama penyusunan penelitian.
12. Rekan-rekan satu bimbingan terutama Fany Feronica, Winda, Dinda Anindia, Pebyanti Maulani, Putri Yayu, Alma, Fauzan, Adit, dan Rizqi yang kerap memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2016 terutama Annafi Fiola Lestari dan Dhea Adelia yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
14. Fita ikhtiarini dan Dian Khaerunnisa selaku kakak tingkat yang kerap memberikan masukan kepada peneliti.
15. Syara Ramadhan, Ula Naila, Risa, dan Nurmilah yang selalu memberikan semangat dan doa kepada peneliti.
16. PCY yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan kepada peneliti.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini sehingga dapat selesai dengan baik.

Akhir kata, semoga penyusunan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, 10 Maret 2020

Tia Sofa Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAKiv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TABELxiii

DAFTAR GAMBAR.....xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 10

1.3.1 Maksud Penelitian..... 10

1.3.2 Tujuan Penelitian 10

1.4 Kegunaan Penelitian..... 10

1.4.1 Kegunaan Teoritis..... 11

1.4.2 Kegunaan Praktis 11

1.5 Lokasi Penelitian 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS PENELITIAN 12**

2.1 Tinjauan Pustaka 12

2.1.1	Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	19
2.1.3	Belanja Daerah.....	21
2.2	Kerangka Pemikiran	26
2.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	26
2.2.2	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah.....	27
2.3	Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	35
3.1	Objek Penelitian.....	35
3.2	Metode Penelitian.....	35
3.2.1	Metode yang Digunakan	35
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	36
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	39
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.5	Rancangan Pengujian Hipotesis	41
3.2.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.2.5.2	Uji Asumsi Klasik	41
3.2.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda	43
3.2.5.4	Analisis Koefisien Determinasi	44
3.2.5.5	Uji Hipotesis	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Hasil Penelitian	48

4.1.1	Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	48
4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	48
4.1.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018.....	50
4.1.2	Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	52
4.1.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018.	54
4.1.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	54
4.1.3.2	Uji Asumsi Klasik	55
4.1.3.3	Analisis Regresi Linier Berganda	58
4.1.3.4	Analisis Koefisien Determinasi	59
4.1.3.5	Uji Hipotesis	60
4.2	Pembahasan	62
4.2.1	Gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018.....	62
4.2.2	Gambaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018.....	63

4.2.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	38
Tabel 4.1	Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	48
Tabel 4.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009- 2018	50
Tabel 4.3	Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	52
Tabel 4.4	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser	57
Tabel 4.8	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
Tabel 4.9	Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	59
Tabel 4.10	Hasil Uji Parsial (Uji t)	60
Table 4.11	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	5
Gambar 1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	7
Gambar 2.1 Paradigma Penelitian	33
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	49
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	51
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi
- Lampiran 2 *Photocopy* Formulir Pengajuan Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 *Photocopy* Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 *Photocopy* Surat Permohonan Perubahan Topik/Judul Skripsi
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018
- Lampiran 6 Tabel t
- Lampiran 7 Tabel F
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pemerintahan yang disertai keterbukaan informasi publik sudah menjadi suatu tuntutan umum di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan pusat maupun daerah, yang mendorong terjadinya otonomi daerah, yaitu suatu proses peralihan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Rahmawati dan Fajar, 2017).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah suatu kebijakan di mana pemerintah daerah mempunyai kebebasan atau suatu kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, serta menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk digunakan dalam hal belanja daerah sesuai dengan asas otonomi.

Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara di mana salah satu instrumen pentingnya adalah pengelolaan atau manajemen belanja daerah yang tercermin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD (Suara Merdeka, 2012 dalam Laksono, 2014). Menurut PP No. 12 Tahun 2019, APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan (Permendagri No. 37 Tahun 2014).

Pengelolaan APBD yang efektif dan efisien dapat dilihat dari pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah secara optimal, yang tentunya membutuhkan alokasi dana yang cukup besar sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Salah satu persoalan muncul saat pemerintah daerah dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan yang besar, sementara pada saat bersamaan, pemerintah daerah memiliki kreativitas yang rendah dalam mengelola APBD (Suara Merdeka 2012 dalam Laksono, 2014).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang menjadi pengurang nilai kekayaan netto dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya, diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Aminus (2018) mengemukakan bahwa belanja daerah digunakan untuk keperluan penyelenggaraan urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim dan Iqbal (2012:28) belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam menstimulus perekonomian daerah. Kepala daerah diminta untuk membelanjakan dana yang mereka kelola sebaik mungkin sebab sebagian belanja tersebut dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Realisasi belanja tidak

boleh melebihi jumlah anggaran yang sudah direncanakan karena belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk melakukan pengeluaran.

Dalam APBD tercantum prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Provinsi DKI Jakarta--yang secara administratif terdiri atas 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (lima) kota administrasi--hanya dapat merealisasikan pendapatan daerah sebesar 93,05% atau senilai Rp61,24 triliun dari target Rp65,81 triliun sehingga terdapat defisit di kisaran Rp174 miliar pada tahun 2018. Walaupun secara rinci, dalam hasil laporan pertanggungjawaban APBD memang terungkap belanja daerah masing-masing berhasil digenjot dan mencatatkan persentase penyerapan di atas 80% (Sumber: <https://m.bisnis.com>).

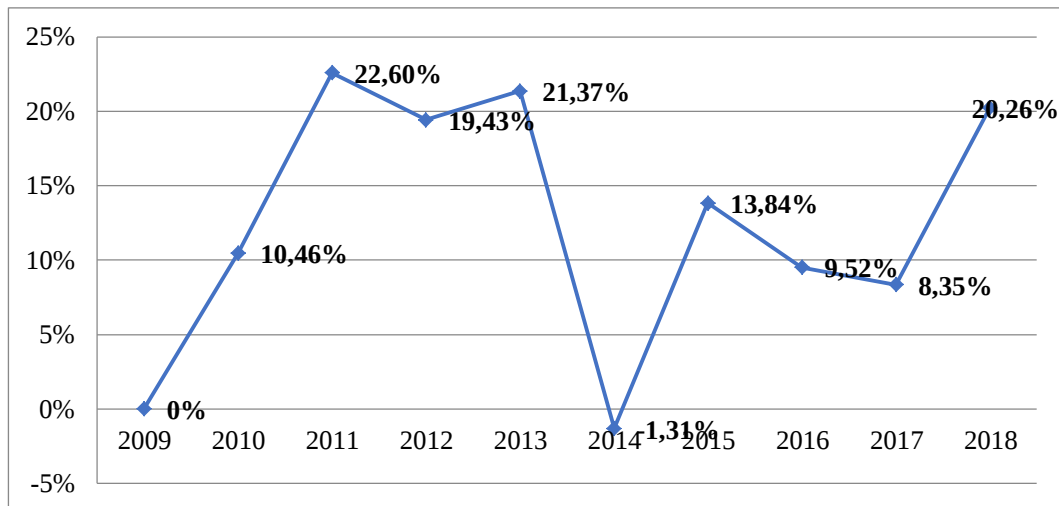
Defisit tersebut ditutupi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,4 triliun (dari SiLPA 2017, pinjaman daerah, dan pengembalian penyertaan modal daerah) dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,5 triliun (dari penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah), sehingga menghasilkan SiLPA Rp9,7 triliun. Oleh sebab itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menampik bahwa realisasi kegiatan atau program pemerintah pada 2018 tidak berjalan maksimal. Justru penerimaan asli daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, dan pendapatan sah lain yang perlu lebih digenjot (Sumber: <https://m.bisnis.com>).

Dalam rapat paripurna pertanggungjawaban realisasi APBD 2018 tersebut, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyoroti SiLPA yang besar sebagai hal yang merugikan masyarakat, sebab menandakan pembangunan tidak terealisasi secara maksimal, padahal masyarakat membayar pajak setiap saat (Sumber:

<https://m.bisnis.com>). Sejalan dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah daerah belum mampu merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan belanja program dengan baik karena dalam APBD provinsi se-Indonesia, SiLPA provinsi tahun 2018 menunjukkan rapot merah di mana provinsi DKI Jakarta berada pada urutan pertama dengan SiLPA terbesar yaitu Rp12.171.689.204.491,00 (Sumber: <http://www.rmolbanten.com>).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, rendahnya belanja daerah masih memiliki tantangan. Belanja yang bersifat kompleks seperti belanja modal yang membutuhkan perencanaan yang baik masih terkendala, sedangkan belanja lain seperti belanja pegawai dan subsidi dapat terealisasi dengan cepat. Sementara itu, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menjelaskan bahwa belanja daerah per Juli 2019 cenderung stagnan dan mengalami penurunan sebesar -0.67% (yoy), padahal pendapatan daerah pada periode yang sama justru tumbuh 7.62% (yoy). Ia juga menuturkan bahwa belanja daerah cenderung terealisasi pada akhir tahun yaitu pada September dan Oktober (Sumber: <https://m.bisnis.com>).

Pada hakikatnya, pertumbuhan belanja memiliki kecenderungan untuk naik dari tahun ke tahun dengan alasan penyesuaian inflasi dan perubahan kurs rupiah (Faqihudin, 2013). Laju pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2009 sampai 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id> diunduh 19 Desember 2019 (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.1, pertumbuhan belanja daerah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 dan 2011, belanja daerah mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10,46% dan 22,6% namun turun menjadi 19,43% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja daerah naik sebesar 21,37% namun kembali merosot pada tahun 2014 yaitu menjadi -1,31%. Pertumbuhan belanja daerah melambung tinggi pada tahun 2015 yaitu menjadi 13,84% sementara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yaitu masing-masing menjadi 9,52% dan 8,35%, kemudian akhirnya pada tahun 2018 kembali naik menjadi 20,26%.

Menurut Kainde (2013) besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada periode berkenaan. Namun, berbeda

dengan belanja daerah yang realisasinya tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan, maka realisasi pendapatan daerah justru boleh melebihi anggaran.

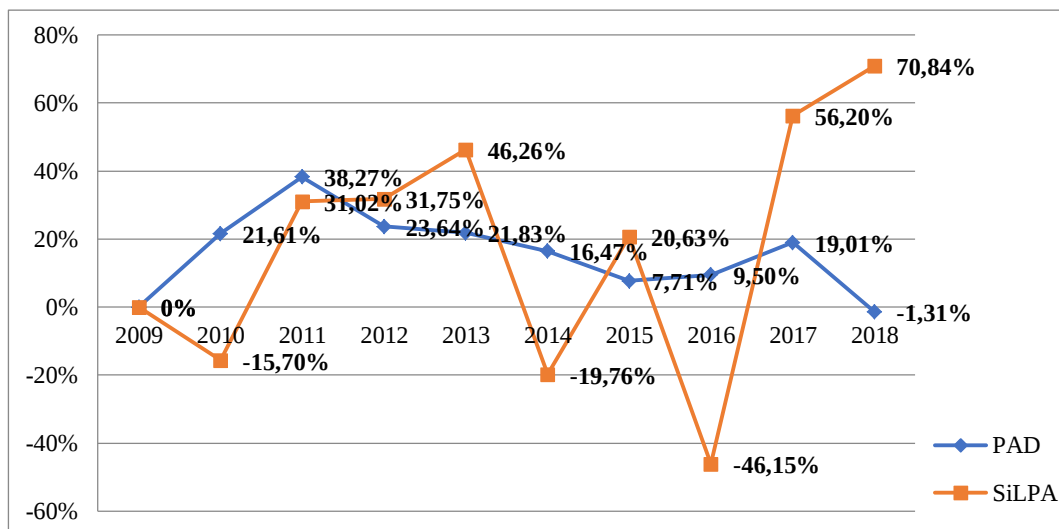
Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD menurut pasal 6 ayat (1) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga apabila PAD meningkat, maka proporsi dana untuk pembelanjaan pemerintah daerah juga akan meningkat, di mana hal ini dapat memacu terwujudnya agenda pembangunan daerah, peningkatan kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi (Tambunan dalam Devita dkk., 2014). PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar dengan didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat terwujud, yaitu besarnya peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah (Masdjojo dan Sukartono, 2009).

Selain PAD, pemerintah juga dapat memanfaatkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran untuk membiayai belanjanya. Berdasarkan situs Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id> diunduh pada 2 Oktober 2019) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran bersangkutan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 137 sampai dengan 153

menjelaskan bahwa penggunaan SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dibanding realisasi belanja, mendanai kegiatan lanjutan atas belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Penggunaan SiLPA yang timbul di akhir tahun anggaran antara lain dapat berasal dari adanya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dananya tidak terserap, dan adanya pelampauan pendapatan (Sumber: perpustakaan.bappenas.go.id diunduh tanggal 13 Januari 2020). Mulyadi (2014) dalam Kasdy dkk. (2018) menyatakan bahwa semakin besar sisa lebih perhitungan anggaran maka semakin besar pula realisasi belanja terutama belanja modal. Laju pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018
Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id> diunduh 19 Desember 2019 (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 21,61% dari tahun 2009 dan diikuti oleh kenaikan pada tahun 2011 menjadi 38,27%. Pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 masing-masing yaitu 23,64%, 21,83%, 16,47%, dan 7,71%. Pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan pertumbuhan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 9,5% dan 19,01%. Namun pada tahun 2018 pertumbuhannya kembali merosot menjadi -1,31%.

Adapun, laju pertumbuhan sisa lebih perhitungan anggaran berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan realisasi SiLPA sempat turun pada tahun 2010 yaitu sebesar -15,7% namun pada tahun 2011, 2012, dan 2013 terus meningkat setiap tahunnya masing-masing yaitu 31,02%, 31,75%, dan 46,26%. Pada tahun 2014 pertumbuhan SiLPA merosot menjadi -19,76% dan pada tahun 2015 kembali naik hingga mencapai 20,63%. Namun pada tahun 2016 SiLPA mengalami penurunan yang cukup drastis hingga menjadi -46,15% dan tahun 2017 kembali melonjak menjadi 56,2% diikuti kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi 70,84%.

Berbagai penelitian mengenai permasalahan yang sama telah dilakukan, di antaranya oleh Rahmawati dan Fajar (2017) di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2014) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara teoritis berpengaruh terhadap total belanja daerah di masa yang akan datang. Sementara itu, Fibriana (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Martunis dkk. (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) baik secara bersama-sama maupun terpisah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan hasil penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.
2. Bagaimana gambaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.
2. Untuk mengetahui gambaran dari Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang bersangkutan baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pemahaman, dan menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.

2. Bagi pihak akademis

Diharapkan dapat melengkapi keilmuan bidang akuntansi, khususnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan belanja daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan belanja daerah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Balai Kota Blok G 7, lantai 14-15, Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halim dan Kusufi (2012:101) mengemukakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 3 menyebutkan bahwa PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sesuai dengan Perwujudan Desentralisasi. Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa

sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu:

a. Pajak provinsi, terdiri atas:

- 1) Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- 5) Pajak rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- b. Pajak kabupaten/kota, terdiri atas:
- 1) Pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - 2) Pajak restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - 3) Pajak hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - 4) Pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - 5) Pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - 7) Pajak parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - 8) Pajak air tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - 9) Pajak sarang burung walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 angka 64, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Syamsi (1994) dalam Najoan dkk. (2016) menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu imbalan atas pemakaian manfaat yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan yang diperoleh secara langsung.

Objek retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 108 yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyebrangan di air
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usah perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Menurut Erlina, dkk. (2015) jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang

dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah

- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari BLUD
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Menurut Erlina, dkk. (2015:207) selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Abdullah dan Rona (2014) menyatakan bahwa SiLPA adalah sisa anggaran tahun sebelumnya ($t-1$) yang diterima dan digunakan pada pada tahun berjalan (t).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran adalah selisih dana dari aktualisasi pendapatan dan belanja selama satu periode. Menurut Mahmudi (2019:172) SiLPA merupakan kas bebas (*free cash*) yang belum terikat penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terkait dengan adanya kebijakan anggaran defisit atau karena adanya perubahan anggaran. Menurut Parwati dkk. (2015) mekanisme perubahan APBD menjadi sarana legal untuk menganggarkan kembali SiLPA tahun sebelumnya agar dapat dialokasikan untuk belanja sesuai preferensi penyusun anggaran.

Mahmudi (2019:173) menyatakan bahwa SiLPA akhir tahun anggaran hanya dapat diketahui jumlahnya setelah berakhir periode anggaran tersebut, yaitu tanggal 31 Desember. Namun untuk SiLPA tahun anggaran sebelumnya akan muncul dalam APBD tahun berkenaan sebagai pos penerimaan pembiayaan.

SiLPA menurut PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 71 dapat bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan
5. Penghematan belanja
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Mahmudi (2019:172) menyatakan bahwa SiLPA pada akhir periode anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

SiLPA = Pelampauan realisasi pendapatan dari target + Penghematan belanja + Sisa anggaran kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan + kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan pada akhir tahun anggaran

2.1.3 Belanja Daerah

Menurut PSAP No. 2 Paragraf 7 dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah suatu kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan

neto akibat transaksi masa lalu. Menurut Mahmudi (2019:153) belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Kainde (2013) mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 55 terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

- c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi:

a. Belanja tanah

Belanja tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja bangunan dan gedung

Belanja bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a

sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja aset lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Pendapatan asli daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti lain menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah dan komponen yang sangat penting yang harus selalu dikembangkan agar pemerintah mampu membiayai tanggung jawab belanja yang dibutuhkan sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja dalam penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima.

Studi tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah telah banyak dilakukan. Di antaranya yaitu Solikin (2016) yang meneliti tentang analisis *flypaper effect* pada pengujian pengaruh dana alokasi umum, pendapatan

asli daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah di Indonesia (studi tahun 2012-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel independen dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, serta di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian lain tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah pada tahun 2014-2016 di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat oleh Dermawan (2017).

Sejalan dengan hal tersebut, Adriani dan Yasa (2015) mengemukakan bahwa keterkaitan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah sangat erat, karena semakin besar pendapatan asli daerah maka akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, Sasana (2011) mengemukakan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

2.2.2 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah

Struktur APBD baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya. SiLPA merupakan faktor

yang mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah atau kegiatan belanja daerah. SiLPA merepresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya dan besar kecilnya SiLPA sangat bergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martunis dkk. (2014) tentang pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah: analisis perubahan APBD kabupaten/kota se-Aceh menunjukkan bahwa baik secara bersama-sama atau secara terpisah sisa lebih perhitungan anggaran dan pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Aceh.

SiLPA yang ada pada periode tertentu di suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan anggaran pada periode sebelumnya dan akan digunakan untuk menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung di masa yang akan datang sehingga peranan SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah di masa yang akan datang (Simamora, 2015).

Berikut adalah hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Rahmawati, M., & Fajar,	Pengaruh Pendapatan Asli	Variabel Dependen (Y):	Hasil uji hipotesis secara parsial dapat

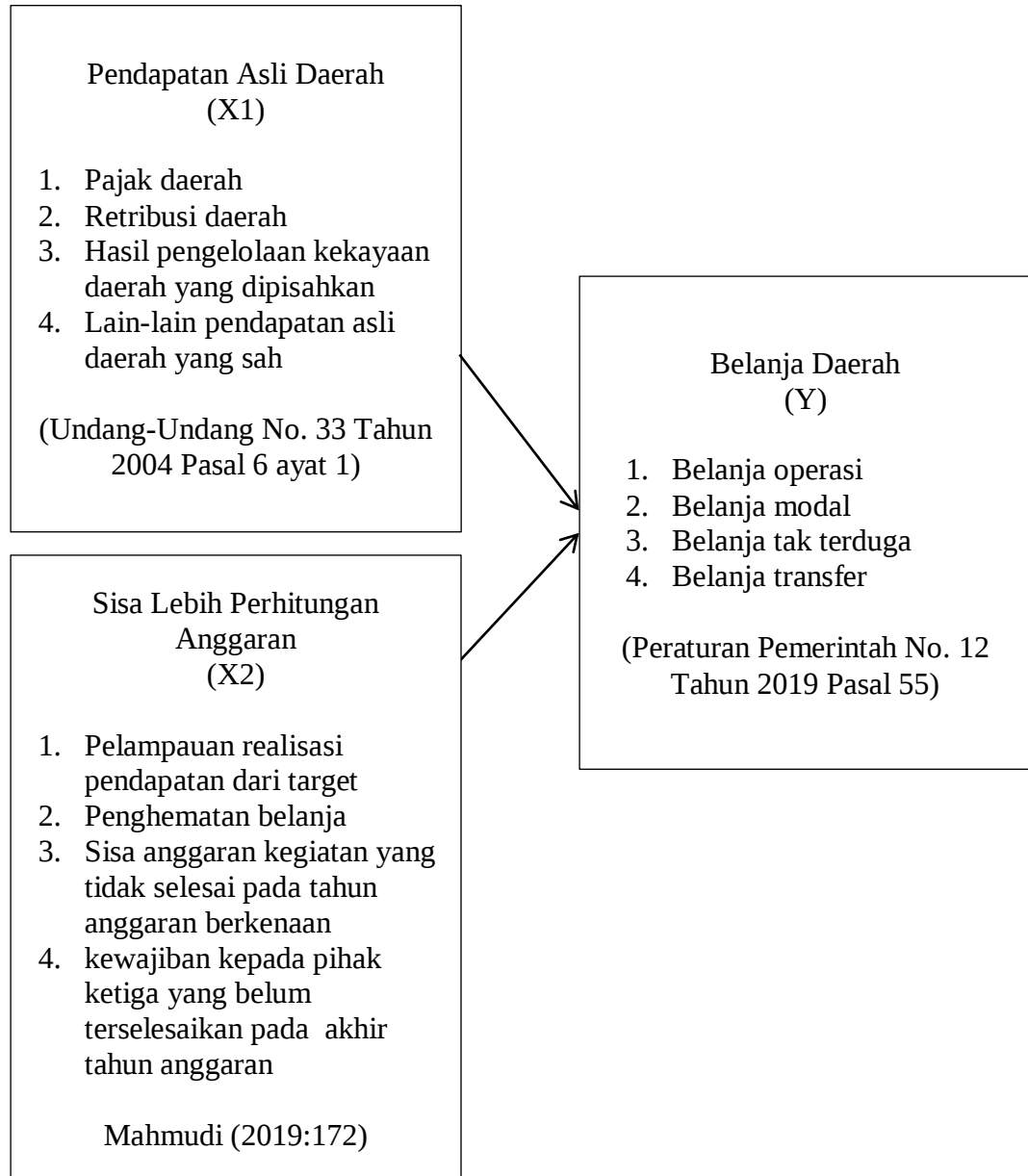
C. M. (2017)	Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	Belanja Daerah Variabel Independen (X): Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2)	diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.
Simamora, S. (2015)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja	Variabel Dependen (Y): Belanja Daerah Variabel Independen (X): Sisa Lebih	Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoritis sisa lebih perhitungan anggaran, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

	Daerah: Dalam Perspektif Teoritis.	Perhitungan Anggaran (X1) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (X2)	berpengaruh terhadap total belanja daerah dimasa yang akan datang.
Fibriana, S. E. (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis <i>Flypaper Effect</i> (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)	Variabel Dependen (Y): Belanja Daerah Variabel Independen (X): Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3)	Hasil analisis linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan, sedangkan dana bagi hasil dan sisa lebih perhitungan anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. selain itu, <i>flypaper effect</i> tidak terjadi pada belanja daerah.

Martunis, M., dkk. (2014)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Aceh	Variabel Dependen (Y): Belanja Daerah Variabel Independen (X): Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2)	Studi ini menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran dan pendapatan asli daerah baik secara bersama-sama atau secara terpisah mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Aceh.
Dermawan, W. D. (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)	Variabel Dependen (Y): Belanja Daerah Variabel Independen (X): Pendapatan Asli Daerah	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Solikin, A. (2016)	Analisis <i>Flypaper</i> <i>Effect</i> Pada	Variabel Dependen (Y):	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014)	Belanja Daerah Variabel Independen (X): Dana Alokasi Umum (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3)	dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah. Nilai koefisien dana alokasi umum lebih besar dari pendapatan asli daerah dan keduanya signifikan. Hal ini menunjukkan terjadinya <i>flypaper</i> <i>effect</i> pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode tahun 2012 sampai 2014.
--	---	---	--

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan sementara yang dapat diuji untuk memprediksikan apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Hipotesis

merupakan suatu hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji sehingga diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran dan Bougie, 2017:94).

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

H₂: Sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah

H₃: Pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian menurut Sugiyono (2017:4) adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Balaikota Blok G 7, lantai 14-15, Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:24) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

3.2.1 Metode yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif disebut sebagai metode positivistik dan metode konfirmatif karena telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis serta cocok digunakan untuk pembuktian/konfirmasi (Sugiyono, 2015:35).

Sekaran dan Bougie (2017:111) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Sementara itu metode verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji atau mengecek kebenaran dari suatu teori atau kaidah, hukum maupun rumus. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan alat uji statistik.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Sugiyono (2015:96) mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independen (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2015:96). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah (X1)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sisa lebih perhitungan anggaran (X2)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, sisa lebih perhitungan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

2. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk memenuhi penggunaan variabel dalam penelitian ini dan untuk menentukan data yang diperlukan serta untuk memudahkan penggunaan variabel dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut dioperasikan ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
X1: Pendapatan Asli Daerah	Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	- Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Nominal
X2: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Menurut Abdullah dan Rona (2014) SiLPA adalah sisa anggaran tahun sebelumnya (t-1) yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan (t).	- Pelampauan realisasi pendapatan dari target - Penghematan belanja - Sisa anggaran kegiatan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan - kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan pada akhir tahun anggaran	Nominal
Y: Belanja Daerah	Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai	- Belanja operasi - Belanja modal - Belanja tak terduga - Belanja transfer	Nominal

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.		
--	---	--	--

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Sekaran dan Bougie (2017:53) mengemukakan bahwa populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel). Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:148) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Sugiyono (2015:149) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh atau istilah lainnya adalah sensus, merupakan

teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh juga diartikan sebagai sampel yang sudah maksimum. Teknik ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang kecil (Sugiyono, 2015:156).

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:130) data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data ini misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang diberikan oleh media, web, internet, dan lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi provinsi DKI Jakarta yaitu <https://ppid.jakarta.go.id>.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari website resmi provinsi DKI Jakarta yaitu <https://ppid.jakarta.go.id> dalam bentuk laporan realisasi dan anggaran belanja pemerintah provinsi DKI Jakarta.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2017:291) berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, situs web, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya.

3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:21) statistik deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan kondisi pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

3.2.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Jika telah memenuhi asumsi klasik, maka model regresi ideal (tidak bias). Sebelum

melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2016:103), yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residu berdistribusi normal atau tidak, salah satunya dapat dilakukan dengan cara melihat analisis statistik. Menurut Ghozali (2016:156), uji normalitas yang sering digunakan dalam penelitian biasanya menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan pada pengujian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah tidak normal

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas salah satunya dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolinearitas yaitu nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghazali (2016:134) bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji glejser.

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghazali (2016:142), uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, maka tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:144).

3.2.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2016:94) analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = belanja daerah

a = konstanta

b_1b_2 = koefisien regresi

X_1 = pendapatan asli daerah

X_2 = sisa lebih perhitungan anggaran

e = error

3.2.5.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = koefisien determinasi

r^2 = nilai koefisien korelasi

3.2.5.5 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen. Pengujian yang digunakan adalah:

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Adapun rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\beta}{se(\beta)}$$

(Ghozali dan Ratmono, 2017:57)

Keterangan:

r = koefisien korelasi

n = banyaknya data

Berikut pernyataan hipotesis statistik penelitian ini:

- a. $H_0 : \beta_1 = 0$: tidak terdapat pengaruh dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
- b. $H_a : \beta_1 \neq 0$: terdapat pengaruh dari pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
- c. $H_0 : \beta_2 = 0$: tidak terdapat pengaruh dari sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah
- d. $H_a : \beta_2 \neq 0$: terdapat pengaruh dari sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_α diterima atau dapat dikatakan signifikan.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_α ditolak atau dapat dikatakan tidak signifikan.

2. Uji Simultan (Uji F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F test (Anova test). Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun cara menentukan F_{hitung} adalah sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2015:297)

Keterangan:

R^2 = koefisien korelasi berganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: tidak terdapat pengaruh dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah
- b. $H_\alpha : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: terdapat pengaruh dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah

Berikut adalah kriteria uji F:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau dapat dikatakan bahwa semua variabel X secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel Y.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau dapat dikatakan bahwa semua variabel X secara simultan dan signifikan tidak mempengaruhi variabel Y.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembelanjaan daerah. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah dan kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah itu sendiri.

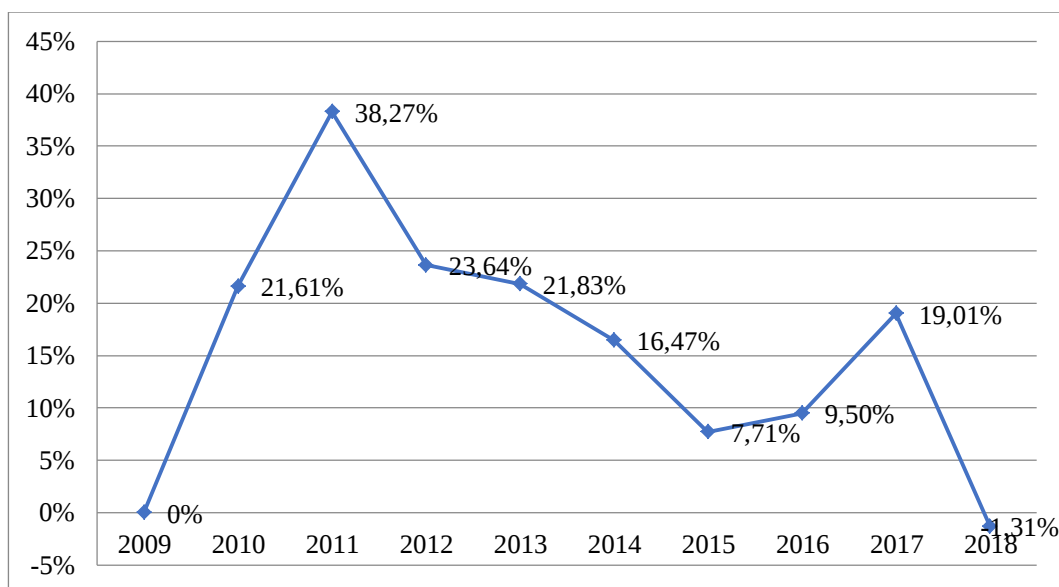
Berikut adalah data mengenai pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	10.601.057.958.783	0	0
2010	12.891.992.182.041	2.290.934.223.258	21,61
2011	17.825.987.294.430	4.933.995.112.389	38,27
2012	22.040.801.447.924	4.214.814.153.494	23,64
2013	26.852.192.452.636	4.811.391.004.712	21,83

2014	31.274.215.885.719	4.422.023.433.083	16,47
2015	33.686.176.815.708	2.411.960.929.989	7,71
2016	36.888.017.587.716	3.201.840.772.008	9,50
2017	43.901.488.807.743	7.013.471.220.027	19,01
2018	43.327.136.602.811	-574.352.204.932	-1,31
Rata-rata	27.928.906.703.551	3.272.607.864.403	17

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta (Data Diolah)



Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 21,61% dari tahun 2009 dan diikuti oleh kenaikan pada tahun 2011 menjadi 38,27%. Pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 masing-masing yaitu 23,64%, 21,83%, 16,47%, dan 7,71%. Pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan pertumbuhan pada tahun 2016 dan 2017

yaitu menjadi 9,5% dan 19,01%. Namun pada tahun 2018 pertumbuhannya kembali merosot menjadi -1,31%.

4.1.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan faktor yang mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah atau kegiatan belanja daerah.

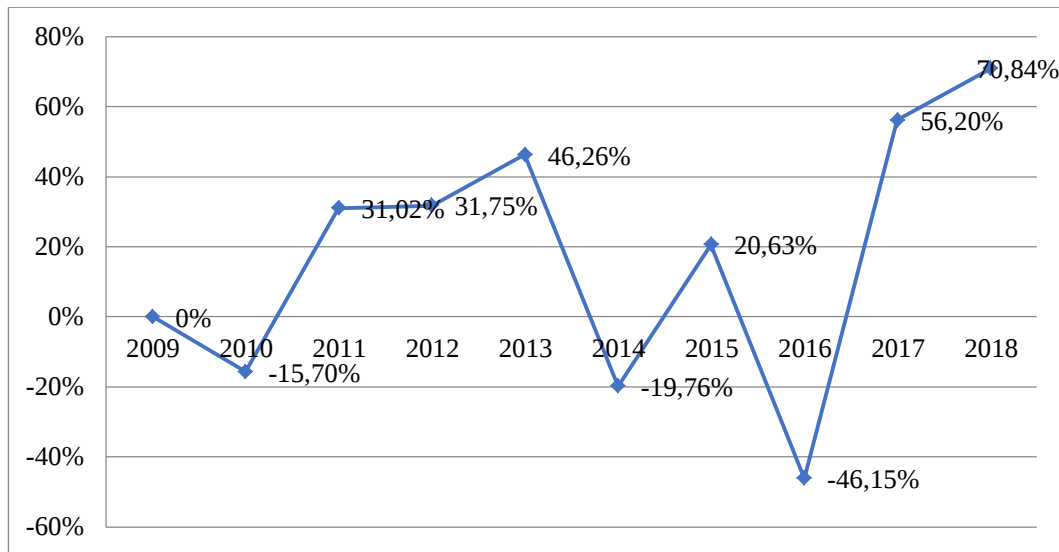
Berikut adalah data mengenai sisa lebih perhitungan anggaran provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Tabel 4.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	4.446.373.058.586	0	0
2010	3.748.512.147.298	-697.860.911.288	-15,70
2011	4.911.196.018.129	1.162.683.870.831	31,02
2012	6.470.618.490.508	1.559.422.472.379	31,75
2013	9.463.721.530.814	2.993.103.040.306	46,26
2014	7.593.994.776.473	-1.869.726.754.341	-19,76
2015	9.160.897.609.233	1.566.902.832.760	20,63
2016	4.933.519.451.750	-4.227.378.157.483	-46,15

2017	7.706.289.336.723	2.772.769.884.973	56,20
2018	13.165.646.901.882	5.459.357.565.159	70,84
Rata-rata	7.160.076.932.140	871.927.384.330	18

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta (data diolah)



Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, laju pertumbuhan sisa lebih perhitungan anggaran berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan realisasi SiLPA sempat turun pada tahun 2010 yaitu sebesar -15,7% namun pada tahun 2011, 2012, dan 2013 terus meningkat setiap tahunnya masing-masing yaitu 31,02%, 31,75%, dan 46,26%. Pada tahun 2014 pertumbuhan SiLPA merosot menjadi -19,76% dan pada tahun 2015 kembali naik hingga mencapai 20,63%. Namun pada tahun 2016 SiLPA mengalami penurunan yang cukup drastis hingga menjadi -46,15% dan tahun 2017 kembali melonjak menjadi 56,2% diikuti kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi 70,84%.

4.1.2 Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

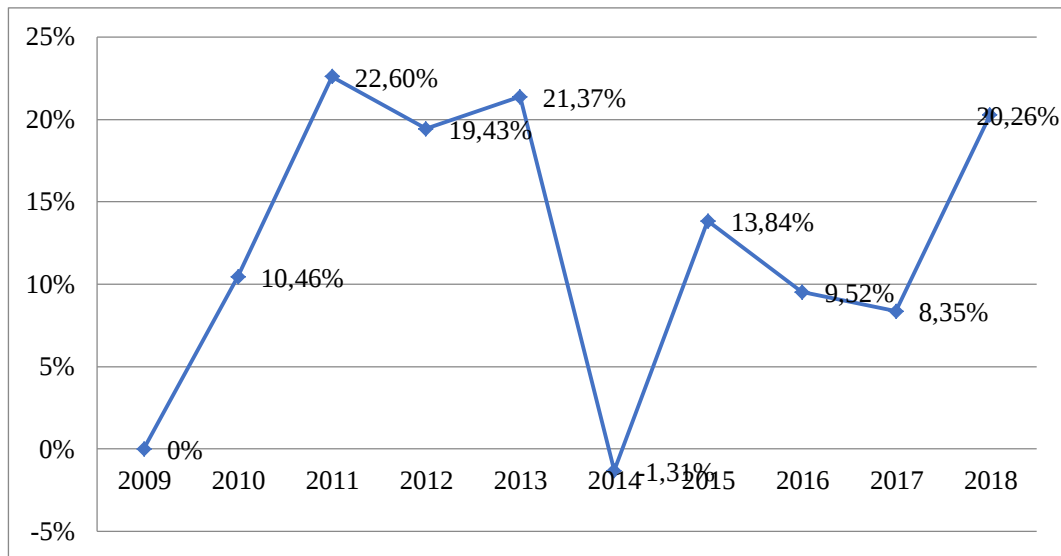
Belanja daerah adalah suatu kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan netto akibat transaksi masa lalu. Belanja daerah merupakan biaya rutin yang harus dibayar oleh pemerintah daerah setiap waktunya. Belanja daerah dapat bersumber dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Berikut adalah data mengenai belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Tabel 4.3 Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2009	19.511.099.430.822	0	0
2010	21.552.895.838.935	2.041.796.408.113	10,46
2011	26.423.599.893.297	4.870.704.054.362	22,60
2012	31.558.706.898.925	5.135.107.005.628	19,43
2013	38.301.502.396.759	6.742.795.497.834	21,37
2014	37.799.664.298.459	-501.838.098.300	-1,31
2015	43.031.322.947.557	5.231.658.649.098	13,84
2016	47.128.810.245.854	4.097.487.298.297	9,52
2017	51.066.081.379.887	3.937.271.134.033	8,35
2018	61.410.121.851.157	10.344.040.471.270	20,26
Rata-rata	37.778.380.518.165	4.189.902.242.034	12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta (data diolah)



**Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2009-2018**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Berdasarkan gambar 4.3 pertumbuhan belanja daerah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 dan 2011, belanja daerah mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10,46% dan 22,6% namun turun menjadi 19,43% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 pertumbuhan belanja daerah naik sebesar 21,37% namun kembali merosot pada tahun 2014 yaitu menjadi -1,31%. Pertumbuhan belanja daerah melambung tinggi pada tahun 2015 yaitu menjadi 13,84% sementara pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yaitu masing-masing menjadi 9,52% dan 8,35%, kemudian akhirnya pada tahun 2018 kembali naik menjadi 20,26%.

4.1.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018.

4.1.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang diteliti. Berikut adalah *output* yang diperoleh berdasarkan data penelitian:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistics				
		Pendapatan Asli Daerah	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Belanja Daerah
N	Valid	10	10	10
	Missing	0	0	0
Mean		27928906703551,10	7160076932139,60	37778380518165,20
Median		29063204169177,50	7032306633490,50	38050583347609,00
Std. Deviation		11930786514654,861	2893611827669,087	13395254287109,168
Range		33300430848960	9417134754584	41899022420335
Minimum		10601057958783	3748512147298	19511099430822
Maximum		43901488807743	13165646901882	61410121851157

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai pendapatan asli daerah adalah antara Rp10.601.057.958.783 sampai Rp43.901.488.807.743 dengan rata-rata sebesar Rp33.300.430.848.960. Sisa lebih perhitungan anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar Rp3.748.512.147.298, nilai maksimum sebesar

Rp13.165.646.901.882 dan rata-rata sebesar Rp9.417.134.754.584. Sedangkan belanja daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp41.899.022.420.335 dengan nilai minimum sebesar Rp19.511.099.430.822 dan nilai maksimum sebesar Rp61.410.121.851.157.

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik Kolmogorov-Smirnov. Berikut adalah *output* yang diperoleh berdasarkan data penelitian:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0003906
	Std. Deviation	2237919395723
Most Extreme Differences		,70300000
	Absolute	,123
	Positive	,119
	Negative	-,123
Test Statistic		,123
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2019

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menyatakan bahwa apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data dari setiap variabel berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data dari setiap variabel tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada data penelitian ini adalah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	485739613 0488,711	235594606 3172,949		2,062	,078		
	PAD	,929	,099	,828	9,388	,000	,513	1,950
	SiLPA	,973	,408	,210	2,384	,049	,513	1,950

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Model regresi yang bebas dari multikolinearitas mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$. Berdasarkan tabel di atas, variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran menunjukkan nilai

VIF sebesar 1,950 dan nilai *tolerance* sebesar 0,513. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode glejser. Berikut adalah *output* yang diperoleh berdasarkan data penelitian:

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,043	,810		-1,289	,239
PAD	,027	,033	,409	,823	,438
SiLPA	,009	,041	,105	,211	,839

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber: Data diolah, 2019

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser adalah apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,438 dan sisa lebih perhitungan anggaran adalah sebesar 0,839. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data penelitian.

4.1.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Melalui analisis regresi linier berganda, dapat dilihat hubungan linier antara variable-variabel independen dengan dependen. Berikut adalah *output* yang diperoleh berdasarkan data penelitian:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4857396130	2355946063		2,062	,078
	488,711	172,949			
Pendapatan Asli Daerah	,929	,099	,828	9,388	,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	,973	,408	,210	2,384	,049

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4857396130488,711 + 0,929X_1 + 0,973X_2$$

Maka masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 4857396130488,711 menyatakan bahwa jika pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka belanja daerah akan berkurang sebesar 4.857.396.130.488,711.
- Nilai koefisien untuk pendapatan asli daerah atau variabel X_1 adalah sebesar 0,929. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah satu satuan maka variabel belanja daerah (Y) akan naik sebesar

0,929 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

- c. Nilai koefisien untuk sisa lebih perhitungan anggaran atau variabel X1 adalah sebesar 0,973. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran satu satuan maka variabel belanja daerah (Y) akan naik sebesar 0,973 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.1.3.4 Analisis Koefisien Determinasi

Berikut adalah *output* yang diperoleh berdasarkan data penelitian:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,986 ^a	,972	,964	2537562075125,526

a. Predictors: (Constant), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Nilai R pada tabel di atas adalah untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dasar keputusan untuk mengatakan hubungan yang sangat erat adalah apabila nilai R di atas 50%. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R sebesar 0,986 atau 98,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan variabel belanja daerah.

Nilai koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh adalah sebesar 0,972 atau 97,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah

dan sisa lebih perhitungan anggaran secara simultan memberikan pengaruh sebesar 97,2% terhadap variabel belanja daerah sedangkan sisanya, yaitu sebesar 2,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau signifikan sedangkan jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau tidak signifikan.

Nilai t_{tabel} yang digunakan pada uji t ini adalah sebesar 2,365 di mana nilai ini diperoleh dari tabel distribusi t pada $\alpha/2$ yaitu $0,05/2 = 0,025$ dan derajat bebas = $n-k-1$ yaitu $10-2-1 = 7$. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48573961 30488,711	2355946063 172,949		2,062	,078
Pendapatan Asli Daerah	,929	,099	,828	9,388	,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	,973	,408	,210	2,384	,049

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk pendapatan asli daerah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $9,388 \geq 2,365$. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018. Begitu pula dengan sisa lebih perhitungan anggaran, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk sisa lebih perhitungan anggaran lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $2,384 \geq 2,365$. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, sisa lebih perhitungan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu X secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Y. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau signifikan sedangkan jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau tidak signifikan.

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1569820987751041	2	7849104938755	121,895	,000 ^b
	n	000000000000,000		2050000000000		
			0,000			
	Residual	4507454899580757	6439221285115			
		0000000000,000	7	367000000000,		
			000			
	Total	1614895536746848	9			
		700000000000,000				

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 121,895. Nilai F_{tabel} dapat diperoleh dengan melihat derajat pembilang dan derajat penyebut, di mana dalam penelitian ini derajat pembilangnya adalah $k = 2$, dan derajat penyebut adalah $n-k = 10-2 = 8$. Maka, nilai F_{tabel} adalah 4,46. Karena nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ yaitu $121,895 \geq 4,46$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Gambaran Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah yang mencapai 17% per tahun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meskipun sempat mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar -1,31% atau perubahan sebesar Rp574.352.204.932 dari 2017, realisasi pendapatan asli daerah yang paling rendah adalah pada tahun 2009, yaitu sebesar Rp10.601.057.958.783 dan realiasi paling tinggi berada pada tahun 2017 yang mencapai Rp43.901.488.807.743.

Sementara itu, sisa lebih perhitungan anggaran provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung meningkat

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18% per tahun. Adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran yang paling tinggi berada pada tahun 2018 yaitu mencapai Rp13.165.646.901.882 yang disebabkan karena realisasi pendapatan yang besar dan realisasi belanja yang kecil pada tahun sebelumnya. Sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran yang paling rendah berada pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp3.748.512.147.298 yang disebabkan karena realisasi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

4.2.2 Gambaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 berfluktuasi namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Meskipun belanja daerah mengalami pertumbuhan yang menurun pada tahun 2014 yaitu sekitar -1,31% atau perubahan sebesar Rp501.838.098.300 dari 2013, namun belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 12% per tahun yang bersumber dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Nilai realisasi paling tinggi adalah sebesar Rp61.410.121.851.157 yang dicapai pada tahun 2018 dan paling rendah yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp19.511.099.430.822.

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2018

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yang dapat dilihat pada tabel 4.9, nilai t_{hitung} untuk pendapatan asli daerah lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $9,388 \geq 2,365$,

maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat setiap tahunnya terutama peningkatan pada tahun 2011. Penerimaan pendapatan asli daerah yang meningkat diharapkan mampu memberikan efek signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah oleh pemerintah daerah.

Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai belanjanya sendiri sehingga pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber keuangan terbesar pemerintah daerah menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Sejalan dengan itu, konstanta pada hasil persamaan regresi bernilai positif. Hal ini mengandung arti bahwa pendapatan asli daerah digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah sebagai biaya yang tetap harus dibayar setiap waktunya. Sumber-sumber pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penelitian ini memperkuat basis teori penyusunan anggaran bersifat *incrementalism*, bahwa alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan bertambah/berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah (Masdjojo dan Sukartono, 2009). Semakin besar realisasi pendapatan suatu daerah maka akan semakin besar pula realisasi belanja daerah tersebut. Beberapa penelitian

yang sejalan dengan penelitian ini di antaranya adalah Rahmawati dan Fajar (2017), Fibriana (2018), Martunis (2014), dan Dermawan (2017).

Hasil uji parsial (t) juga menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 sesuai tabel 4.9, di mana nilai t_{hitung} untuk sisa lebih perhitungan anggaran lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $2,384 \geq 2,365$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini mengandung arti bahwa sisa lebih perhitungan anggaran sebagai komponen penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk kegiatan belanja daerah terutama belanja modal, menutup defisit anggaran apabila realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan seperti yang dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran pada provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 berfluktuasi namun cenderung meningkat. Kenaikan pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 56,2% dari tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah yang besar merupakan indikasi adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan keuangannya. Sisa lebih perhitungan anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran belanja publik pada APBD tidak optimal (Sumber: perpustakaan.bappenas.go.id diunduh tanggal 13 Januari 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simamora (2014) dan Martunis (2014), namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fibriana (2018).

Hasil uji simultan (F) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 yang dapat dilihat pada tabel 4.10. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $121,895 \geq 4,46$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa baik pendapatan asli daerah maupun sisa lebih perhitungan anggaran mempunyai peran yang cukup besar dalam pembiayaan belanja daerah provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan asli daerah digunakan sebagai salah satu sumber keuangan utama untuk kegiatan belanja provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka proporsi dana untuk pembelanjaan daerah juga meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah ini diharapkan mampu memacu terwujudnya agenda pembangunan daerah dan kemandirian daerah. Di sisi lain pemerintah daerah juga menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai salah satu komponen pembiayaan untuk mendanai kegiatan lanjutan atas belanja langsung dan mendanai kegiatan belanja pada tahun 2018, di mana realisasi belanja daerah lebih besar daripada realisasi pendapatan atau terjadinya defisit anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martunis dkk. (2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2018 sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan asli daerah mengalami tingkat pertumbuhan yang cenderung naik setiap tahunnya dengan rata-rata pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan terbesar. Pendapatan asli daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang cukup besar per tahun dengan realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 dan realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2009. Sementara itu, sisa lebih perhitungan anggaran mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan yang terbilang cukup besar per tahun. Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dan realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2010.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah mengalami tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi namun cenderung meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup besar per tahun. Kenaikan pada belanja daerah ini rata-rata berasal dari belanja operasi yang tinggi setiap tahunnya. Realisasi belanja daerah yang paling tinggi

terjadi pada tahun 2018 dan realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2009.

3. Secara parsial, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta. Begitu juga dengan uji hipotesis secara simultan, pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat diartikan bahwa baik pendapatan asli daerah maupun sisa lebih perhitungan anggaran mempunyai peran yang cukup besar dalam pembiayaan belanja daerah provinsi DKI Jakarta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud menyampaikan saran berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, sebagai berikut:

1. Berdasarkan penurunan yang terjadi pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kembali kemandirian keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan secara intensifikasi, yaitu melalui upaya pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak serta retribusi daerah kemudian mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi lalu mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada dan memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai. Kemudian secara ekstensifikasi, yaitu dengan upaya penggalan

sumber-sumber penerimaan yang lebih diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya defisit sekaligus mencapai tujuan otonomi daerah yang efektif, sebaiknya pemerintah provinsi tidak hanya meningkatkan penerimaan daerahnya dari pendapatan asli daerah saja, tetapi juga meningkatkan jenis penerimaan pendapatan lain berupa pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Nilai sisa lebih perhitungan anggaran yang sangat besar menunjukkan masih kurang tepatnya perencanaan anggaran atau masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan target-target pembangunan yang tidak tercapai. Untuk mengurangi pembentukan SiLPA yang cukup tinggi di periode berikutnya, pemerintah diharapkan memperbaiki kinerja aspek perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan agar penetapan dan pelaksanaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan SiLPA yang baik dapat mendorong alokasi SiLPA sesuai prioritas kebutuhan belanja tahun berjalan. Pemerintah juga diharapkan transparan dalam menyajikan secara rinci berapa nilai SiLPA efisiensi, dan berapa nilai SiLPA dari gagalnya pekerjaan atau proyek. Hal ini dirasa penting untuk masyarakat agar mengetahui sejauh mana kinerja eksekutif melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik.
3. Untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan belanja daerah, pemerintah perlu memperhatikan konsep manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah dapat mendukung upaya pemerintah dalam

rangka menjalankan perannya memberikan pelayanan publik melalui alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara responsif, efisien, dan efektif.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya penelitian dilakukan pada objek lain dan menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang waktu penelitian yang lebih panjang, serta menggunakan variabel yang lebih bervariasi misalnya dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan Rona, R. (2014), Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7(1), 179-202.
- Adriani, N.L.G.C. dan Yasa, I.N.M. (2015), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(11).
- Aminus, R. (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 9(1).
- Dermawan, W.D. (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah EDUKASI*, 5(2).
- Devita, A., Delis, A. dan Junaidi, J. (2014), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Erlina., Rambe, O.S. dan Rasdianto. (2015), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*, Jakarta: Salemba Empat.
- Faqihudin, M. (2013), Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik. *Permana*, 4(2).
- Fibriana. (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi Ke-8*, Semarang: BPFE Universitas Dipenogoro.
- Ghozali, I. dan Ratmono, D. (2017), *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10 Edisi Ke-2*, Semarang: BPFE Universitas Dipenogoro.

Halim, A. dan Iqbal, M. (2012), *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-3*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Halim, A. dan Kusufi, M.S. (2012), *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>
diunduh tanggal 2 Oktober 2019.

<http://www.rmolbanten.com/read/2019/06/19/9191/Mendagri:-Silpa-Provinsi-Tahun-2018-Capai-20-Triliun-> diunduh tanggal 6 Oktober 2019.

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/21/download-tabel-t-untuk-d-f-1-200/> diunduh tanggal 18 Desember 2019.

<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/22/download-tabel-f-lengkap>
diunduh tanggal 18 Desember 2019.

<https://m.bisnis.com/jakarta/read/20190801/77/1131416/besarnya-silpa-pemprov-dki-jadi-perhatian> diunduh tanggal 18 Desember 2019.

<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190827/10/1141484/belanja-daerah-per-juli-2019-stagnan-ini-penjelasan-pemerintah> diunduh tanggal 1 Oktober 2019.

<https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah> diunduh tanggal 19 Desember 2019.

https://www.google.com/url?q=http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file%5Ffile%3Ddigital/152601-%5B_konten_%5D-konten%2520D332.pdf&sa=u&ved=2ahUKEwjio6GDuoDnAhUHVH0KHbdRCkUQFjADegQlBxAB&usg=AOvVaw1cApLAQH1QAFFs5Ey7Yur diunduh tanggal 13 Januari 2020.

Kainde, C. (2013), Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3 : 393-400.

Kasdy, L.M., Nadirsyah dan Fahlevi, H. (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kab/Kota di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1).

- Laksono, B.B. dan Subowo, S. (2014), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Mahmudi. (2019), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ke-4*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martunis., Darwanis. dan Abdullah, S. (2014), Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7(1).
- Masdjojo, G.N. dan Sukartono, S. (2009), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006–2008. *Telaah Manajemen*, 6(1).
- Najoan, C., Sabijono, H. dan Datu, C. (2016), Analisis Sistem Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Parwati, S.M., Budiasih, I.G.A.N. dan Astika, I.B.P. (2015), Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diunduh tanggal 5 Oktober 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD diunduh tanggal 2 Oktober 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diunduh tanggal 29 September 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diunduh tanggal 20 Oktober 2019.
- Rahmawati, M. dan Fajar, C.M. (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).

- Sasana, H. (2011), Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi Ke-6*, Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, S. (2015), Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah: Dalam Perspektif Teoritis. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 14(2).
- Solikin, A. (2016), Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1).
- Sugiyono. (2015), *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diunduh tanggal 2 Oktober 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diunduh tanggal 20 Oktober 2019.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diunduh tanggal 2 Oktober 2019.